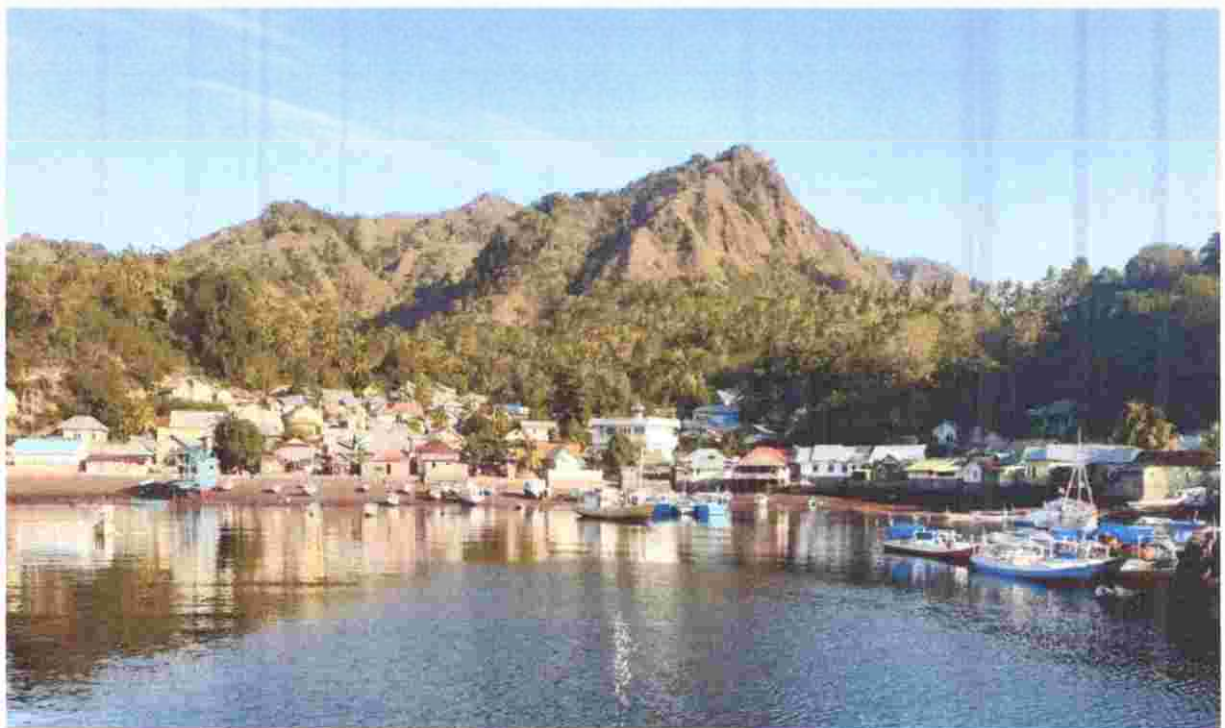




PERATURAN BUPATI ENDE NO. TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN PULAU ENDE
2024**



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU ENDE

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Pada...

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU ENDE TAHUN 2025

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Pulau Ende tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2025.
- (3) Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
 - e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.

Pasal 3

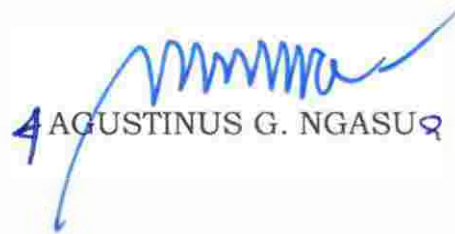
Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Pulau Ende dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. BUPATI ENDE,

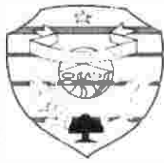

AGUSTINUS G. NGASUA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 54



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Eltari Nomo 2 Telepon (0381) 22848

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE

Nomor 54 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI

Nomor 54 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU ENDE TAHUN 2025

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Nomor 54 Tahun 2024

Tanggal 22 Oktober 2024

P.j. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende

EFREM DIAKON AINA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaan-Nya, kami telah dianugerahkan rahmat yang berlimpah dalam upaya merangkum rangkaian Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pulau Ende Tahun anggaran 2025..

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan strategis PD dalam hal ini Kantor Kecamatan Pulau Ende dengan memprioritaskan rasionalitas kognifikasi terhadap rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-OPD Periode 2025-2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 merupakan suatu kewajiban absolut yang dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan dokumen yang akan menjadi upaya unitasi kerangka Visi, Misi, Persepsi, strategi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Pulau Ende dalam proses pendampingan, pembinaan dan pelayanan juga sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju komunitas masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan melalui sebuah revolusi ekspektasi untuk kristalisasi nilai-nilai pelayanan dalam kerangka evaluasi kinerja PD pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas Sumber daya manusia PD.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 juga merupakan Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh PD Kantor Kecamatan Pulau Ende untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Pulau Ende. Keberhasilan sebuah Rencana Kerja yang diimplementasikan dalam sebuah pelayanan publik hanya akan terwujud bila ada kerjasama tiga komponen yakni Tokoh adat, Tokoh agama dan Pemerintah berjalan bersama yang juga membutuhkan keterbukaan, komitmen dan konsistensi yang diwujudkan dalam integritas pelayanan. Semoga dengan adanya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 ini kita semua dapat bersama-sama membangun masyarakat yang adil, mandiri dan sejahtera sebagai bentuk partisipasi kita dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Pulau Ende secara khusus dan Kabupaten Ende secara umum.

Sekian dan terimakasih,

Pulau Ende, 17 Juli 2024
Camat Pulau Ende, ✍



YAHYA JABAR, SH
PEMBINA
NIP. 19670908 198903 1 015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 54 TAHUN 2024
TANGGAL 21 Oktober 2024
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PULAU ENDE
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1 - 2
1.2 Landasan Hukum	2 - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2024	6 - 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20-24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, dan KEGIATAN	37
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	37- 38
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	38
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1 Rencana Kerja	54
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	54
BAB. V. PENUTUP	55
5.1 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan	55
5.2 RencanaTindak Lanjut	55

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2024
TABEL	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende
TABEL	2.3	Keadaan Pegawai Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022
TABEL	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
TABEL	3.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana kerja (Renja)-SKPD tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-OPD.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende melakukan penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan Renja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Kecamatan Pulau Ende sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende mempunyai kewajiban yang sama. Hal ini dimaksudkan agar arah dan kebijakan perencanaan kegiatan OPD dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Pulau Ende sejalan dan saling bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Ende. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh satuan kerja terkait dalam merencanakan kegiatan dan program di Kecamatan Pulau Ende.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Yang memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta

berperan strategis dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Berdasarkan isi dan kedudukannya, maka Renja OPD tahun 2025 menjabarkan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Rencana Kerja sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- berakhir pada tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
 12. Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renja Kecamatan Pulau Ende adalah

1. Untuk memberikan gambaran riil tentang usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2025, dalam rangka mengatasi permasalahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah dan acuan Program dan Kegiatan Renja di Kecamatan Pulau Ende sebagai sebuah Wilayah kerja Perangkat Daerah guna bersama-sama semua pihak terkait mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah, sehingga diharapkan terciptanya kerjasama, koordinasi dan kesamaan tindakan, baik antar SKPD, maupun antara Perangkat Daerah dengan masyarakat serta segenap komponen pemangku kepentingan lainnya.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan, evaluasi dan pengawasan prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan pembangunan dalam skala 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menyediakan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Ende pada Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai sumber informasi dalam perencanaan kegiatan di setiap Desa untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pentahapan pembangunan Desa;
4. Menjadi bahan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Ende
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pulau Ende
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulau Ende
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PULAU ENDE

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

Renja Tahun 2025 merupakan Renja dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Ende tahun 2025-2026. Penyusunan Renja Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra 2025-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2045. Dengan demikian evaluasi Renja Kecamatan Pulau Ende Tahun 2023 dapat dikaitkan dengan pencapaian Renstra tahun 2024.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Pulau Ende Tahun 2023, dapat dilihat dari aspek realisasi anggaran dan realisasi target kinerja program/kegiatan dari program Renja dengan Pagu penetapan awal sebesar Rp. 1.313.037.988,00

Berdasarkan tahun 2023 kecamatan Pulau Ende melaksanakan Program/Kegiatan dengan Pagu Indikatif Renja Rp. Rp. 1.313.037.988,00 dan Setelah penetapan perubahan sebesar Rp.1.297.029.992,00.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan keberlanjutan dan aktualisasi program-program pemerintah kabupaten sesuai pendelegasian kewenangan kepada kecamatan sehingga evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kecamatan Pulau Ende Tahun 2023 dan perkiraan tahun berjalan 2024 yang kesemuanya ini mengacu pada Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2019-2024 dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

Adapun pokok-pokok Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2023 berdasarkan realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.268.529.992,- dan realisasi sebesar Rp 1.248.340.669,- (98 %), yang terdiri dari 5 (Lima) kegiatan yakni :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.191.229.992,- dan realisasi sebesar Rp 1.187.253.789,- (99.6 %), yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.191.229.992,- dan realisasi sebesar Rp 1.187.253.789,- (99,6 %);
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 13.013.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.486.880,- (81 %), yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan Yakni :
 - 1) Belanja Alat atau Bahan Kegiatan kantor-Bahan cetak, dengan Pagu Rp. 138.000,- dan realisasinya Rp. 0,-(0 %)
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.875.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.486.880,-
 - c. Penyediaan Adminikstrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 32.487.000,- dan realisasi sebesar Rp 25.516.700,- (79 %), yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yakni :
 - 1) Penyediaan peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.566.700,-,- (79 %);
 - 2) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.500.000,- (100 %);
 - 3) Fasilitasi kunjunga Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.940.000,- (100 %);
 - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.847.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.510.000,-,- (76 %);
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.250.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.348.000,- (81 %), yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.450.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.018.000,-(85 %)
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.730.000,- (66 %)

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.600.000,- (100 %)
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.550.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.735.000,- (58 %), yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni:
 - 1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu sebesar Rp 9.050.000,- dan realisasi sebesar Rp 6.735.000,- (74 %)
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 2.000.000,- (80 %);
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 11.000.000,- (100 %), yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100 %).
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.000.000,- (100 %).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (75 %), yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (75 %), yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (75 %);
4. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100 %), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100 %), yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yakni:
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan memantapkan Penagalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100 %)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.400.000,- (99,99 %), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.400.000,- (99,99 %), yang terdiri dari 6(enam) sub kegiatan yakni :
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (100 %);
 - 2) Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 500.000,- dan realisasi sebesar Rp 400.000,- (90 %).

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100 %)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.000.000,- (100 %);
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ad di kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.000.000,- (100 %).

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.000.000,- (100 %).

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan antara lain :

1. Secara umum, realisasi program/kegiatan memenuhi target yang direncanakan, dimana dengan persentase realisasi tahun anggaran 2023 sebesar 99,6 %;
2. Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tingkat realisasinya sebesar 98% sehingga tingkat realisasi kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah menjadi sebesar 99.6%. Penyebab sub kegiatan tersebut tidak mencapai target adalah karena terjadi mutasi ASN Kecamatan Pulau Ende ke Perangkat Daerah lain, sedangkan penyebab pada sub kegiatan lainnya tingkat realisasinya tidak mencapai target adalah disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ada beberapa sub bagian yang tdk teralisasi. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023, anggaran tersebut mengalami pergeseran karena adanya Pemilihan Umum.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa ada satu sub kegiatan yang tidak mencapai target, namun tidak terlalu berdampak pada kualitas pembinaan dan pengawassan kepada Pemerintah Desa.

Tahun 2023 Kecamatan Pulau Ende melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dalam Renja dengan total Pagu Rp. 1.297.029.992,00 Sedangkan realisasi sampai dengan Bulan Desember 2023 telah melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan, 21 Sub kegiatan sebesar Rp 1.275.740.669,- (98%).

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023. Ditampilkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pulau Ende

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan									
			Target	Persentase		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)									
1	UNSUR KEWILAYAHAN																		
1	14	KECAMATAN		100	Persen	-	100%	Persen	98,49%	Persen	98,49%	100%	Persen	99,61	Persen	49,78			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100	Persen	-	100%	Persen	98,40	Persen	99,40%	100%	Persen	75,93%	Persen	42,71%	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,98%	Persen	1,00%	100%	Persen	100,00%	Persen	54,72%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	9	Dokumen	-	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	3	Dokumen	5	Dokumen	55,56%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00%
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50,00%

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Ende 2025

7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan	-	18	Laporan	18	Laporan	100,00%	18	Laporan	36	Laporan	50,00%
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	-	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	1	Laporan	2	Laporan	50,00%
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	01	2,03	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Orang yang melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Orang/ Bulan	-	1	Orang/ Bulan	1	Orang/ Bulan	100,00%	1	Orang/ Bulan	2	Orang/ Bulan	50,00%
7	01	01	2,03	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24	Laporan	50,00%
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	-	100%	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	0,66%	Persen	50,00%
7	01	01	2,05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	-	1	Orang	1	Orang	100,00%	1	Orang	2	Orang	50,00%
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,97%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	46,88%
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2	Paket	50,00%
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0	Paket	0,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2	Paket	50,00%
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24	Laporan	50,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Kali	-	1	Kali	1	Kali	100,00%	1	Kali	2	Laporan	50,00%

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100%	Persen	91,91%	Persen	91,91%	100	Persen	7,14%	Persen	7,69%
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	1	Unit	100,00%	0	Unit	1,00	Unit	25,00%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	-	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	0	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	0	Unit	0	Unit	0,00%	-	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,89%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	58,87%
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24,00	Laporan	100,00%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Bulan	-	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	11	Bulan	23,00	Bulan	47,92%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	24,00	Laporan	50,00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Orang	-	1	Orang	1	Orang	100,00%	1	Orang	2,00	Orang	50,00%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	-	100	Persen	99,97%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	23,08%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	-	6	Unit	3	Unit	50,00%	0	Unit	3,00	Unit	25,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	-	1	Unit	0	Unit	0,00%	0	Unit	0,00	Unit	0,00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	89%	Persen	0,89%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Dokumen	50,00%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	100,00%
7	01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100	Persen	-	100	Persen	57,69%	Persen	0,58%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	100,00%	Persen	50,00%
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	4	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	2,00	Paket	50,00%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100%	Persen	39,20%

7	01	03	2.02		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	100,00%	100	Persen	100,00%	Persen	39,20%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	72	Kali	-	18	Kali	18	Kali	100,00%	18	Kali	36,00	Kali	50,00%
7	01	03	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	32	Kali	102,00	Kali	36,43%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	100%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	45,00%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	-	100	Persen	99,95%	Persen	1,00%	100	Persen	100,00%	Persen	45,00%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	56	Kali	126,00	Kali	45,00%
7	01	06	2.02	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar	420	Kali	-	80	Kali	80	Kali	100,00%	65	Kali	145,00	Kali	34,52%
7	01	06	2.02	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan aset desa yang dilaksanakan dengan baik dan benar	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	66	Kali	136,00	Kali	48,57%
7	01	06	2.02	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan dengan baik.	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	63	Kali	133,00	Kali	47,50%
7	01	06	2.02	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	65	Kali	135,00	Kali	48,21%
7	01	06	2.02	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan	280	Kali	-	70	Kali	70	Kali	100,00%	66	Kali	136,00	Kali	48,57%

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100	Persen	-	100	Persen	0%	Persen	0,00%	100	Persen	0,00	Persen	0,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	-	100	Persen	0%	Persen	0,00%	100	Persen	0,00%	Persen	0,00%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila	8	Kali	-	2	Kali	0	Kali	0,00%	0	Orang	0,00	Orang	0,00%
7	01	05	2.02	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4	Paket		1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0,00	Paket	0,00%
7	01	05	2.03	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama dan lainnya	4	Paket		1	Paket	0	Paket	0,00%	0	Paket	0,00	Paket	0,00%
7	01	05	2.02	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir pancasila	4	Paket		1	Paket	0	Orang	0,00%	0	Orang	0,00	Orang	0,00%
7	01	05	2.02	6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional melalui kegiatan peringatan hari lahir Pancasila	4	Paket		1	Paket	0	Desa	0,00%	0	Desa	0,00	Orang	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Ende

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Ende dilakukan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2019-2024 sedangkan tolok ukur SPM dan indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Pulau Ende belum ditetapkan indikator pelayanannya yang disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Kemandirian Desa 1. Desa sangat tertinggal 2. Desa tertinggal 3. Desa Berkembang 4. Desa maju	-	-	- 4 5 -	- 4 5 -	- 3 6 -	- 2 6 1	- 4 5 -	- 4 5 -	- - - -	- 3 6 -	- 2 6 1	
2	Nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende	-	-	c	cc	b	b	c	cc	-	b	b	

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemandirian desa Kecamatan Pulau Ende dapat digambarkan, pada tahun 2021 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang. Pada tahun 2022 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang sedangkan pada tahun 2023 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang. Diproyeksikan pada tahun 2024 3 Desa Tertinggal 6 Desa Berkembang dan pada tahun 2025 diproyeksikan 2 Desa Tertinggal 6 Desa Berkembang 1 Desa Maju. Target indikator kedua perolehan nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende pada tahun 2022 adalah "c", pada tahun 2023 adalah "cc" dan diproyeksikan pada tahun 2024 dan 2025 dapat memperoleh masing-masing nilai "b"

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemerintah Kecamatan Pulau Ende, berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Kecamatan Pulau Ende dapat menjalankannya dengan baik, namun secara teknis masih terdapat beberapa masalah yang harus diatasi, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkanlah SDM aparatur Pemerintah kecamatan yang kompeten, karena itu harus dilaksanakan diklat-diklat dan bimtek-bimtek ke luar daerah; akan tetapi yang sering terjadi adalah aparatur yang mengikuti bimtek dan diklat merupakan aparatur yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak akan memberikan dampak bagi peningkatan SDM aparatur kecamatan. Melihat hal tersebut diatas, maka sangatlah dibutuhkan aparatur yang berkualitas, karena itu segala bentuk diklat dan bimtek perlu dilaksanakan secara bergantian antar aparat sehingga adanya keseimbangan dalam peningkatan SDM dan terwujudnya optimalisasi SDM aparatur Pemerintah Kecamatan Pulau Ende.

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk program ini belum adanya kerjasama tim / antar aparat sehingga masih mengalami kendala dalam pelaporan, terutama dari segi waktu, sering kali terjadi keterlambatan dari beberapa desa dan kelurahan sehingga aparatur kecamatan harus menjemput data-data laporan tersebut ke desa-desa. Masih terdapatnya perbedaan format/bentuk pelaporan bulanan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, karena itu pemerintah kecamatan harus melakukan bimbingan, pembinaan dan penataan secara rutin.

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.

Untuk sistem pengawasan selama ini belum semuanya terarah dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan juga karena keterbatasan aparatur kecamatan. Dalam kaitan dengan fungsi pemberdayaan, masih terdapat kelompok-kelompok bantuan di masyarakat yang belum terjangkau untuk diberdayakan; sedangkan dalam bidang pemerintahan, masih dibutuhkan pembinaan administrasi desa secara terus menerus, meningkatkan koordinasi lintas sektor; dalam fungsi keamanan dan ketertiban masih sangat minimnya tenaga aparatur kecamatan baik dari segi kualitas untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan pemberdayaan pembangunan dalam wilayah kecamatan karena ini merupakan indikator utama yang masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende

Beberapa masalah dan hambatan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas fiskal rill daerah yang masih sangat terbatas sehingga berdampak pada pendanaan untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat strategis di Kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, apalagi kalau dilihat dari letak kecamatan Pulau Ende berbatasan dengan Laut SawudiSebelah Utara, berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah Selatan,berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Timur dan berbatasan dengan Laut Sawu disebelah Barat sehingga sarana dan prasarana umum harus dibangun dengan baik;
2. Belum adanya regulasi dalam hal ini peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat, sehinggaruang gerak kecamatan dalam hal pelayanan belum jelas, pemerintah kecamatan hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutinitas saja;
3. Kecamatan tidak diberikan ruang yang luas dalam pembinaan pengelolaan dana desa sehingga berdampak pada keterlambatan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan juga evaluasi;
4. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Kecamatan Pulau Ende
Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan/ Latar Belakang Pendidikan	Kondisi Staf	
			Keadaan Pegawai Tahun 2023	Jumlah Pegawai yang diharapkan
1.	Camat	Strata Satu (S1) (Serjana Pertanian)	1 Orang	
2.	Sekretaris Camat	Strata Satu (S1) (Sarjana Statistik)	1 Orang	
3.	Kasie Pemerintahan	Strata Satu (S 1) (Sarjana Ekonomi)	1 Orang	
4.	Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa	Strata Satu (S1) (Serjana Sosial)	1 Orang	
5.	Kasie Pelayanan Umum	Strata Satu (S1) (Sarjana Hukum)	1 Orang	
6	Kasie Polisi Pamong Praja dan Linmas	Strata Satu (S1) (Serjana Ekonomi)	1 Orang	
7.	Kasie Kesejahteraan Masyarakat	Strata Satu (S1) (Sarjana Sosial)	1 Orang	
8.	Kasubbag Program Keuangan dan Pelaporan	-	-	1 Orang
9.	Kasubbag Kepegawaian	Diploma 3 (D3) Teknik	1 Orang	
10	Staf	Starata Satu (S1) (Serjana Hukum)	1 Orang	
		SMA Sederajat	9 Orang	

Dari komposisi yang ada jumlah pegawai di Kantor Camat Pulau Ende sebanyak 18 orang, dimana 8 orang menduduki jabatan dan 10 orang sebagai staf. Oleh sebab itu banyak tugas yang dikerjakan oleh kepala seksi yang sebenarnya porsinya staf ataupun sebaliknya ada juga tugas yang porsinya para kepala seksi dan kasubbag yang dikerjakan oleh staf. Selain mengerjakan tugas pokok dalam tiap seksi, staf juga ditunjuk oleh pimpinan sebagai bendahara baik rutin maupun gaji. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di kecamatan Seharusnya tiap seksi membawahi 4 orang staf sementara tiap kasubbag membawahi 3 orang staf, sehingga tidak terjadi pembebanan tugas tambahan yang melebihi tugas pokok.

Dari gambaran masalah yang dihadapi tersebut, maka dampak yang akan sangat dirasakan adalah besarnya ketergantungan camat terhadap alokasi kegiatan Dinas, Badan dan Kantor (PD di Kabupaten), meskipun hal yang sangat berhubungan dengan tugas-tugas atributif (yang melekat pada jabatan).

Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepada daerah : "*membangun dari Desa dan Kelurahan*", serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Beberapa tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan di Kecamatan Pulau Ende adalah :

a. Peluang

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang sudah tertata dengan baik;
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diberikankesempatan untuk merumuskan perencanaan kegiatan dan keuangan (meski baru sebatas kegiatan rutin);
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Adanya Situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pulau Ende.

b. **Tantangan**

1. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai
2. kebijakan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pulau Ende;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Daya dukung kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang masih belum seimbang dengan tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini;
5. Kondisi geografis wilayah dengan topografis daerah pegunungan, menyebabkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi dan kesulitan dalam memprediksi kemampuan potensi wilayah secara riil dalam kerangka persiapan perencanaan yang berkualitas;
6. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
7. Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selain semakin menegaskan hakikat otonomi desa tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Merumuskan Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah kepada Camat. Hal ini akan memberikan peluang dalam hal pendekatan pelayanan dan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, serta memudahkan bagi kecamatan dalam melakukan pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal.
2. Memberikan kesempatan kepada kecamatan untuk merencanakan anggaran yang langsung berhubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan pemerintahan desa (Bimtek bagi aparat dan lembaga – lembaga kemasyarakatan di desa) serta pengembangan kapasitas pegawai (BKPSDM). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Semakin memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah (koordinator penyelenggaraan pemerintahan) di wilayah kecamatan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban dimana kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki sehingga dilakukan seleksi terhadap pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan program pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota.

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Pulau Ende untuk Tahun 2025 masih tetap sama/tidak mengalami perubahan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan pertama-tama atas pertimbangan kondisi riil, kebutuhan organisasi serta bertujuan meningkatkan daya dukung terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pada Tahun Anggaran 2024 kegiatan ini ada dalam RKA/DPA, sehingga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan kembali dalam Renja Kecamatan demi tercapainya Peningkatan sumber daya Aparatur.

Penjelasan mengenai Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel 2.4 (terlampir).

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende

Nama Perangkat Daerah:

Kecamatan
Pulau Ende

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kecamatan				1.638.491.764	Kecamatan				1.638.491.764
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.288.991.764	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	1.288.991.764
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	42.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	42.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.132.926.764	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.132.926.764
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.127.259.764	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.127.259.764
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81 Dokumen	1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.167.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.167.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	24 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	24 Laporan	2.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.365.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.365.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.865.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	20.865.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.500.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	27.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	27.500.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	20.000.000
Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	1Paket	7.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	1 Paket	7.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	8.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	8.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	16.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Pulau Ende, Nioriwoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	16.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	2.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Aset Tetap Lainnya	5 Unit	7.500.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Aset Tetap Lainnya	5 Unit	7.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Laporan	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Laporan	7.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	20.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	20.500.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	20.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	20.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	24.750.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Baik	100 %	24.750.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	24.750.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	24.750.000

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100%	27.500.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	100%	27.500.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dolumen	27.500.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dolumen	27.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan	100%	27.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan	100%	27.250.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	2 Laporan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	2 Laporan	9.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2Laporan	9.125.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 Laporan	9.125.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	9.125.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	9.125.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	50.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	50.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik	100 %	15.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik	100 %	15.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Kali	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Kali	15.000.000

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	35.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	35.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9 Kali	10.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9 Kali	10.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9Laporan	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9Laporan	15.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	9 Laporan	10.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0	10.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	50.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	21.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	21.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	6.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	6.500.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Dokumen	14.500.000					14.500.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	29.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	29.000.000

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2Laporan	29.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	29.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 %	50.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Baik	100%	50.000.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	12.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	12.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Orang	9.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Orang	9.500.000
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	12.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Orang	12.000.000
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1Laporan	7.500.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoriwoi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1Laporan	7.500.000

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Ende 2025

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoiwoi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3Laporan	9.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoiwoi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3Laporan	9.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoiwoi	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Ende, Pulau Ende, Ndoiwoi	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100.000.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	7.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	7.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	6.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	6.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	6.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	8.500.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	10.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15 Dokumen	7.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	7.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	5.000.000
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	4.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	4.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	4.500.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	3.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	3.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	4.000.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	400.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	400.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3 Dokumen	7.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3 Dokumen	7.000.000
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.500.000
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Dokumen	7.500.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Dokumen	7.500.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Dokumen	9.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Dokumen	9.500.000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	7.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	7.000.000

1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja adalah melalui mekanisme yang diawali dari musrenbang Desa, musrenbang kecamatan hingga di forum OPD. Dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan 10 kegiatan yang dibahas di forum Musrenbang Kecamatan dan 5 kegiatan diverifikasi OPD Teknis untuk ditentukan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. akan masuk kedalam Rencana Kerja OPD Teknis, dari 15 Usulan dapat diuraikan sebagai berikut:

10 (sepuluh) Usulan yang dibahas di Forum Musrenbang tingkat Kecamatan, yaitu:

1. Rehabilitasi Rumah Dinas Para Medis (Bidan, Perawat, Nakes lainnya) dari Desa Rendoraterua;
2. Rehabilitasi Pustu dan Fasilitas Pendukungnya Desa Rorurangga;
3. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan Desa Redodori;
4. Pengembangan Pustu dan Fasilitas Pendukungnya Desa Redodori;
5. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dari Desa Redodori;
6. Pembangunan Tembok Penahan Abrasi dari Desa Renga Mange;
7. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan Desa Kazokapo;
8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu Desa Kazokapo;
9. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan Desa Paderape;
10. Pemeliharaan Rumah Dinas Para Medis (Bidan, Perawat, Nakes lainnya) Desa Redodori

Sedangkan 5 usulan yang diverifikasi oleh OPD Teknis adalah :

1. Bantuan Benih / Bibit Tanaman Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Desa Redodori;
2. Bantuan Benang Tenun Ikat Desa Paderape;
3. Bantuan Peralatan Tangkap: Kapal Motor Desa Ndoriwoi;
4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Perdesaan Desa Ndoriwoi;
5. Bantuan Peralatan Tangkap: Gillnet Desa Ndoriwoi.

sedangkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tidak ada yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa amanat peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil/PNS yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
3. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, dimana bahwa kecamatan mempunyai dua kewenangan yakni kewenangan delegatif dan kewenangan atributif dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum diwilayah kerja Camat.namun pada pelaksanaan di Kabupaten Ende belum ada kewenangan delegatif yang dilimpahkan kepada kecamatan, sehingga kecamatan hanya melaksanakan kegiatan rutinitas tahunan yang ada dalam dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA.
4. Dalam Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan berbunyi "Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang
 - b. dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah.
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - d. Penyelenggaraan pelayanan terpadu
 - e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camatPasal 33 Ayat 2 berbunyi "hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri".Hal ini kembali menegaskan bahwa Kecamatan harus diberikan ruang yang luas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Pemberdayaan dan Pembangunan.

- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (Pasal 49, ayat (2). Uraian tersebut diatas kembali menegaskan bahwa:
- Kecamatan adalah OPD yang memiliki kekhususan bila dibandingkan dengan SKPD lain;
 - Kecamatan adalah OPD yang berada di wilayah dan berfungsi sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan;
 - Selain melakukan pelayanan kepada masyarakat Camat juga berfungsi melakukan pembinaan kewilayahan;
 - Camat adalah perpanjangan tangan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulau Ende

3.2.1 Tujuan Renja

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kecamatan yang lebih operasional dan dituangkan dalam Renja Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende Tahun 2025. Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Pulau Ende adalah sebagai berikut :

Tujuan Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende yang merupakan penjabaran dari misi kelima RPJMD Kabupaten Ende, sasaran kesatu pada tujuan kesatu yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif, dan Eifisien.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik.

setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program strategis

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pulau Ende merencanakan 6 Program, 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 1.638.491.764,- Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel 3 (terlampir)

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program kegiatan dalam Renja Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025, adalah :

a. Dukungan Terhadap Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Visi : Membangun Dari Desa dan Kelurahan tidak saja menempatkan masyarakat serta wilayah desa dan kelurahan sebagai fokus dan lokus pembangunan, melainkan pertama-tama sebagai subjek pembangunan yang dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelestarian pembangunan.

Semangat ini mengharuskan hadirnya salah satu prasyarat utama yakni pada aspek kualitas sumber daya aparatur pemerintahan dan lembaga – lembaga kemasyarakatan. Semangat ini secara implisit dihadirkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang selain menegaskan kembali kekuatan desa sebagai sebuah daerah otonom tetapi juga membawa tuntutan akan keharusan pembinaan dan pendampingan yang secara terus menerus oleh aparat pemerintah daerah.

b. Pencapaian Pelayanan Prima

Beberapa faktor pendukung terciptanya pelayanan prima adalah sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, dukungan keuangan serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan ini bertujuan agar tercapainya pelayanan yang memuaskan: transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

dengan didukung oleh kemampuan sumber daya aparatur yang berkualitas, dukungansarana dan prasarana yang memenuhi standar, keuangan yang memadai serta kebijakan yang mendukung terciptanya inovasi dan kreativitas aparatur di wilayah.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende
KECAMATAN PULAU ENDE

KODE REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	01					KECAMATAN								1.638.991.764			1.672.324.548
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	1.288.991.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%				1.292.324.548
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-		100%				42.750.000
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %				6.250.000
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %				6.250.000

7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.250.000
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.000.000
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.000.000
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.000.000
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah secara lengkap, memadai dan tepat waktu	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.000.000
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	1.132.926.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	1.134.067.548
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Tersedianya Tambahan Penghasilan Pegawai	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	1.127.259.764	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	1.127.567.548

7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.000.000
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.167.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.500.000
7	01	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.000.000
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	4.500.000
7	01	01	2	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.500.000
7	01	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.000.000
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	23.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	24.500.000

7	01	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	3.000.000
7	01	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	20.865.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	21.500.000
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	15.500.000
7	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.500.000
7	01	01	2.06	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan Dokumen Kantor Terlaksananya Penggandaan Bahan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.500.000
7	01	01	2.06	6	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.500.000
7	01	01	2.06	8	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan dalam rapat koordinasi internal dan konsultasi di luar daerah Tersedianya makan minum harian rapat bulanan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	3.000.000

7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara baik selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	27.307.000	
7	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	20.000.000
7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.307.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	24.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	24.700.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	8.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	8.500.000
7	01	01	2.08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	16.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	16.200.000
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Baik selama 1 tahun	Kecamatan Pulau Ende	100%	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	19.000.000

7	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2.000.000
7	01	01	2,09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran untuk Perpanjangan STNK, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	2000.000
7	01	01	2,09		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.500.000
7	01	01	2,09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabiltasi gedung kantor dan banguna lainnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	7.500.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	105.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulau Ende	100 %	20.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	21.000.000
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi./Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	20.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	21000.000

7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pulau Ende	100 %	24.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		25.000.000
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	24.750.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	25.000.000
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pulau Ende	100 %	27.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100%	28.000.000
7	01	02	2	03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa	100 %	27.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	28.000.000
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pulau Ende	100 %	27.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100%	31.000.000
7	01	02	2	04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.000.000
7	01	02	2	04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.125.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.500.000

7	01	02	2	04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diiimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diiimpahkan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.125.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.500.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	55.000.000
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Baik	Kecamatan Pulau Ende	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	16.000.000
7	01	03	2	01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	16.000.000
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulau Ende	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100%	39.000.000
7	01	03	2	3	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	11.000.000
7	01	03	2	3	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	16.000.000

7	01	03	2	3	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	12.000.000
7	01	06				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	Kab. Ende, Ende Selatan, Semua Desa	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	55.000.000
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kefenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pulau Ende	100%	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	23.000.000
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	6.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.000.000
7	01	04	2	01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	14.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	16.000.000
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pulau Ende	100%	29.000.000		100%	32.000.000
7	01	04	2	02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	29.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	32.000.000

7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	55.000.000
7	01	03	2.03			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pulau Ende	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	55.000.000
7	01	05	2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	13.000.000
7	01	05	2	01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terciptanya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.500.000
7	01	05	2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	13.500.000
7	01	05	2	01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	8.000.000

7	01	06	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.000.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	110.000.000
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-	100%	110.000.000
7	01	06	2	01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	8.500.000
7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terciptanya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.500.000
7	01	06	2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	6.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.000.000
7	01	06	2	01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	10.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	11.000.000

7	01	06	2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	8.000.000
7	01	06	2	01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	6.000.000
7	01	06	2	01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	4.500.000
7	01	06	2	01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	5.000.000
7	01	06	2	01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	4.000.000
7	01	06	2	01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksana Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	5.000.000
7	01	06	2	01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	5.000.000

7	01	06	2	01	0015	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	7.500.000
7	01	06	2	01	0016	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	13.000.000
7	01	06	2	01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tersedianya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	8.000.000
7	01	06	2	01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Ende, Pulau Ende, Semua Desa	100 %	9.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Perumusan rencana kerja merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende pada tahun 2025 yang diawali dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan (Juli s/d Desember 2024)
 - Setelah penetapan Renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Kecamatan Pulau Ende sebagai bahan Rancangan APBD 2025;
 - Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan;
 - Persiapan dokumen teknis (optional sesuai jenis kegiatan);
 - Persiapan proses pengadaan barang/jasa.

- b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada Januari s/d Desember 2024

- c. Tahap Pengendalian dan Evaluasi

- Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende;
- Pengendalian dan evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja);

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Adapun Pendanaan Perangkat Daerah melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ende sesuai dengan Dokumen RKPD tahun 2024 semuanya berasal dari APBD Kabupaten Ende dengan Pagu Rp. 1.263.316.103,-

BABV PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan masukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD (khususnya rencana Alokasi program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Ende); yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA / DPA Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende Tahun Anggaran 2025 dikendalikan oleh Camat Pulau Ende selaku Kepala SKPD dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan. Dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi (Sekretariat dan seksi) di Kecamatan Pulau Ende.
3. Camat akan melakukan evaluasi atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya menjadi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pulau Ende dalam bentuk: Laporan Rutin Kegiatan Bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan, serta Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada akhir Tahun Anggaran. Hasil Evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka review Rencana Kerja tahun berikutnya.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka Kecamatan Pulau Ende akan menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan berharga bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya bagi Kecamatan Pulau Ende.

Pj. BUPATI ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU